

## Tawuran di Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes

Titi Yuliana,\* Indriyanto

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

\*titiyulianaya@gmail.com

### Abstract

*This article discusses brawls between residents involving residents of Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, and Pamedaran Villages, Kejiwaan District, Brebes Regency in the period 2008-2015. This research uses a critical historical method with a social history approach which can provide a description of brawls between residents in the three villages. This article attempts to explore the problems that cause conflict and lead to brawls. The results of the research show that people, especially village youth, are very easily provoked by things that are sometimes considered trivial. Conflicts can even occur on Eid al-Fitr when many people from overseas return to the village. Various mitigation efforts have been carried out by various parties, from officials, village government, regional government, to community leaders. Some of the efforts made include compromise, mediation, reconciliation and continuing to build friendship. However, brawls still occurred frequently in the period 2008 to 2015.*

**Keywords:** Cikeusal Kidul Village; Cikeusal Lor Village; Pamedaran Village; Countermeasures; Brawl Between Residents.

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai tawuran antarwarga yang melibatkan warga Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2008-2015. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis dengan pendekatan sejarah sosial yang dapat memberikan deskripsi mengenai tawuran antarwarga di ketiga desa tersebut. Artikel ini berusaha menggali permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab konflik dan berujung tawuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terutama para pemuda desa sangat mudah tersulut emosi oleh hal-hal yang kadang-kadang dianggap sepele. Konflik bahkan dapat terjadi pada Idul Fitri ketika banyak orang-orang dari perantauan pulang ke desa. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari aparat, pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga juga tokoh masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melalui kompromi, mediasi, rekonsiliasi, dan terus menjalin silaturahmi untuk mencegah konflik.

**Kata kunci:** Desa Cikeusal Kidul; Desa Cikeusal Lor; Desa Pamedaran; Penanggulangan; Tawuran Antar Warga.

### Pendahuluan

Sejak masa reformasi, sering terjadi konflik di berbagai daerah di Indonesia baik antarwarga maupun antara warga dengan pemerintah. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka dapat menimbulkan keresahan dan kecemasan masyarakat sekitar sehingga berpengaruh pada tidak kondusifnya kehidupan yang dapat berakibat pada terhambatnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka berbagai potensi konflik di wilayah administrasi terkecilpun seperti desa harus selalu diwaspadai. Hal itu karena konflik yang terjadi dalam baik dalam skala kecil maupun besar jika terjadi dalam jangka waktu yang lama dapat membahayakan integrasi bangsa, ancaman paling besar sebuah negara.

Konflik dan kerusuhan yang terjadi di daerah pedesaan di Indonesia, tidak lepas dari permasalahan kehidupan ekonomi, politik, agama, sosial, budaya, pendidikan, dan karakter atau sifat masyarakat (Sulaeman, Homzah, & Mauludin, 2009, p. 4). Konflik yang terjadi di daerah pedesaan lebih mudah meletup hanya karena permasalahan sepele dan sering kali menciptakan kerugian sosial, kehilangan harta benda, dan dapat memunculkan perilaku kriminal. Dalam hal ini, manajemen konflik sangat diperlukan agar konflik tidak berlarut-larut (Tim Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Brebes, 2012, p. 4).

Brebes menjadi salah satu kabupaten yang rawan konflik dan sering kali terjadi tawuran karena sehingga memunculkan istilah masyarakat “sumbu pendek”. Artinya, masyarakat di kabupaten tersebut mudah tersulut emosi dan terprovokasi, sekalipun terhadap permasalahan-permasalahan sepele. Ujungnya tentu saja adalah konflik. Hal itu kemudian dikaitkan dengan letak geografis Kabupaten Brebes di pesisir Pantai Utara Jawa yang dikenal keras. Adapun mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan dan tidak jarang terjadi bentrok di kalangan mereka.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes selalu menjadi pusat perhatian karena sering kali terjadi tawuran antarwarga. Tawuran antarwarga bahkan dapat pada Idul Fitri yang disebabkan oleh berbagai permasalahan. Salah satunya adalah gap antara masyarakat yang merantau dan tidak merantau. Salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes yang termasuk ke dalam daerah rawan konflik adalah Kecamatan Ketanggungan. Hal itu dapat dilihat dari seringnya terjadi tawuran antarwarga yang bermula pada masalah sepele dan persoalan di bawah permukaan. Artinya, dari luar masyarakat terlihat aman, tapi apabila dilihat lebih dalam sebenarnya permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam tubuh masyarakat masih membara, sehingga apabila ada persoalan sepele saja akan menimbulkan konflik.

Konflik sosial yang terjadi di pedesaan menarik untuk dikaji dan dianalisis, namun masih jarang mendapatkan perhatian. Studi-studi mengenai konflik-konflik “*headline*” berskala besar sering kali lebih banyak mendapatkan perhatian dan kurang memperhitungkan konflik lokal. Hal itu disebabkan kurangnya data yang representatif pada tingkat geografis yang rendah. Barron (2009) mengungkap kejadian, dampak, dan pola konflik lokal di Indonesia dengan menggabungkan penelitian lapangan kualitatif dan analisis statistik eksplorasi dari Statistik Potensi Desa pada 2003 yang dikumpulkan oleh Biro Statistik (Potensi Desa-PODES). Data tersebut memetakan konflik di seluruh desa/lingkungan di Indonesia, sehingga konflik kekerasan dapat diamati di seluruh nusantara. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa konflik lokal antarkabupaten mempunyai bentuk dan dampak yang bervariasi dan faktor lokal merupakan faktor kuncinya. Sementara itu, hasil analisis kuantitatif yang tidak mencakup daerah-daerah dengan tingkat konflik tinggi di Indonesia menegaskan adanya faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi itu memiliki korelasi dengan konflik kekerasan dan kemiskinan, kesenjangan, dan variabel-variabel yang mengukur pembangunan ekonomi. Adapula pengelompokan kelompok etnis dan hak kepemilikan yang juga memiliki korelasi dengan kekerasan.

Penelitian ini berfokus pada konflik yang terjadi di Kabupaten Brebes yang melibatkan tiga desa, meliputi: Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran. Secara geografis, ketiga desa itu letaknya berdekatan. Desa Cikeusal Lor dan Cikeusal Kidul hanya dibatasi oleh jalan raya, sedangkan Desa Cikeusal Kidul dengan Pamedaran dibatasi oleh gapura. Konflik yang sering kali berujung tawuran antarwargapun bukan terjadi sekali, namun beberapa kali selama kurun waktu beberapa tahun. Artikel ini menggali

## **Metode**

Artikel ini menggunakan metode sejarah mencakup empat langkah penelitian yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Wasino & Hartatik, 2018). Fakta-fakta dalam artikel ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber,

antara lain Neli Rido (Kepala Desa Cikeusal Kidul), Parmin (tokoh masyarakat), Sudarwadi (Kepala Desa Cikeusal Kidul Periode 2008-2013), Wariji (Kepala Desa Pamedaran Periode 2007-2013 dan 2019-2024), dan Andri Agus Kristianto (Staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes). Hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan sumber lain terutama artikel *online* liputan6.com, panturanews.com, dan regional.kompas.com. Hasil wawancara digunakan untuk memotret penyebab konflik. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali secara langsung permasalahan-permasalahan agar tidak luput dari perhatian.

### **Latar Belakang Penyebab Konflik**

Daerah rawan konflik di Kabupaten Brebes terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: di wilayah pantai, pedesaan atau pegunungan (umumnya terjadi di daerah selatan), perkotaan, dan daerah perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat (Tim Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Brebes, 2012, p. 8). Alasan dominan terjadinya konflik di Kabupaten Brebes adalah karena faktor psikologis yang melahirkan rasa tidak puas dalam diri sendiri. Rasa tidak puas itu contohnya adalah senggolan antarponton saat pertunjukan organ tunggal; adanya ketidakpuasan pada saat pertandingan olahraga antarwarga; tidak puas atas kebijakan pemerintah untuk masyarakat karena dianggap tidak adil; tidak puas karena kepemimpinan tokoh tertentu; tidak puas atas perlakuan tidak adil antarwarga berbeda etnis atau ras; dan kemiskinan (Tim Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Brebes, 2012, pp. 21-22).

Tawuran yang terjadi di Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran misalnya sering kali terjadi karena perilaku pemuda desa. Pemuda atau anak-anak muda umumnya memiliki jiwa dan ego yang tinggi serta pengendalian emosi yang masih belum terkontrol sehingga menyebabkan emosi cepat meletup. Faktor psikologis yang juga sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja adalah tingkat pendidikan dan solidaritas yang kuat sebagai sebuah kelompok. Solidaritas itulah yang sering kali membuat masalah kecil menjadi konflik besar dan berujung tawuran (Sudawardi, Wawancara, 25 Juli 2021).

Adapun permasalahan-permasalahan sepele yang biasanya menyebabkan tawuran di Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran antara lain saling senggol saat menonton pentas organ tunggal atau pertunjukan dangdut di acara pernikahan atau pertandingan bola voli, membunyikan klakson atau knalpot brong pada saat melintas di desa lain atau sebaliknya, memperebutkan kekasih, emosi akibat minuman keras, dan sebagainya. Adapula konflik yang disebabkan karena perebutan sumber daya ekonomi. Dalam konteks itu, konflik antarwarga dapat terjadi pada musim ketiga atau paceklik (Jawa: *pailan*). Konflik perebutan sumber daya alam yang juga berakibat pada kehidupan ekonomi itu didasari oleh kepentingan kelompok, salah satu contohnya adalah perebutan sumber daya air karena dianggap menyalahi kesepakatan awal. Pelanggaran atas perjanjian itu menyangkut jam giliran aliran air. Dikatakan berdasar kepentingan kelompok misalnya itu kelompok petani yang sawahnya berdekatan melanggar kesepakatan dengan mengalirkan air tidak sesuai gilirannya. Hal itu tentu akan berbenturan dengan kepentingan kelompok yang lain. Soal perebutan air sering kali berujung konflik karena dua kelompok atau lebih saling mempertahankan ego yang menutup kemungkinan konflik dapat diselesaikan dengan damai (Sudawardi, Wawancara, 25 Juli 2021).

Hal yang cukup menarik perhatian adalah tawuran antarwarga yang seperti sudah menjadi agenda menjelang dan setelah lebaran Idul Fitri. Penyebabnya adalah segregasi sosial antara warga desa yang merantau ke Jakarta dan pulang ke daerah asalnya-terutama pemuda desa yang pulang dari merantau-membawa budaya dari perantauan. Perilaku-perilaku itu dianggap tidak selaras dengan budaya di daerah asalnya. Sebagai contoh adalah membeli minuman keras secara jor-joran karena merasa membawa "uang yang banyak". Oleh karena menyimpang dari norma masyarakat, maka biasanya menyebabkan

konflik dengan warga yang tidak merantau. Bukan hanya itu, adanya tradisi buka meja di Cikeusal juga sering kali berujung konflik dan tawuran. Tradisi itu sering dinodai tindakan kurang terpuji para pemuda desa, yaitu saling mencaci maki serta perebutan perempuan yang menjadi idola. Biasanya para pemuda desa datang dengan keadaan mabuk dan sempoyongan setengah sadar. Bagi mereka, tradisi-tradisi semacam itu diartikan sebagai pesta yang kemudian memasukkan unsur minuman keras (Fadhilah, 2015, pp. 15-22). Namun, hal itu bukan teradi begitu saja. Minuman keras bagi masyarakat setempat telah menjadi kebiasaan dan kadang-kadang mudah ditemui di acara hajatan. Baik hajatan pernikahan terbuka maupun tertutup, pemiliknya menjamu para tamu dengan dua minuman sajian, yaitu minuman yang biasa dan minuman keras (Sudawardi, Wawancara, 25 Juli 2021).

Penyebab tawuran yang terjadi antara Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran salah satunya disebabkan oleh permasalahan antar individu dan menjunjung rasa solidaritas kelompok. Permasalahan individu biasanya juga menyinggung kelompok yang kemudian berujung tawuran, apalagi setelah individu yang menghadapi masalah mengadu kepada geng. Tidak heran jika kemudian terjadi perkelahian dan saling balas dendam. Tawuran yang terjadi pada 200 misalnya, melibatkan warga Desa Cikeusal Kidul dan Pamedaran. Tawuran yang terjadi pada Kamis dan Jumat, 2-3 Oktober 2008 itu disebabkan karena permasalahan sepele antarpemuda desa ("Lebaran usai, tawuran lanjut," 2008). Permasalahan utamanya adalah pemuda desa dari Desa Pamedaran melintasi jalan di Desa Cikeusal Kidul menggunakan sepeda motor dan mengejar. Perilaku itu ternyata membuat pemuda desa di Desa Cikeusal Kidul tidak terima dan memicu kemarahan. Pemuda tersebut dikejar sambil dicaci maki. Meskipun tidak terkejar, namun ternyata pengejaran itu diketahui oleh pemuda desa dari Desa Pamedaran yang kemudian menceritakan kepada teman-teman kelompoknya. Merekapun tidak terima atas perlakuan tersebut dan kemudian berkumpul untuk menentukan langkah. Para pemuda dari dua desa itu berkumpul. Warga Desa Pamedaran menyerang Desa Cikeusal Kidul dengan membawa senjata. Penyerangan dari Desa Pamedaran ke Desa Cikeusal Kidul telah membuat warga dari Desa Cikeusal Kidul tidak terima dan kemudian menyerang balik warga Desa Pamedaran, sehingga pecah tawuran antarwarga ("Dua desa tawuran, puluhan rumah rusak," 2008).

Pada 2014, tawuran kembali terjadi, tepatnya pada 20 Desember 2014 pukul 09.30 WIB di jalan masuk Desa Cikeusal Lor. Jika dipahami lebih dalam, kejadian itu sebenarnya berawal dari kesalahpahaman. Tawuran antarwarga itu dipicu oleh gesekan antarpemuda desa pada saat pertunjukan organ tunggal yang kembali tidak lepas dari keberadaan minuman keras. Di area organ tunggal diketahui terjadi bentrok kecil akibat senggolan. Oleh karena tidak segera tertangani, bentrok kecil itu membesar akibat saling ancam. Pada Rabu 10 Desember 2014, terjadi tawuran yang merupakan buntut dari senggolan di acara hiburan organ tunggal. Tawuran itu telah menyebabkan salah seorang pemuda dari Desa Cikeusal Lor mengalami luka pada bagian pelipis dan tawuran kembali terjadi pada Sabtu, 20 Desember 2014 ("Buntut tawuran, Cikeusal Lor," 2014).

### **Pola Tawuran**

Tawuran dapat berkembang menjadi lebih besar karena warga di sekitar yang menonton. Mereka justru sangat bersemangat ketika ada konflik yang menyebabkan konflik menjadi semakin anarkis dan tidak beraturan. Tawuran yang terjadi di Desa Cikeusal Lor dapat dikategorikan sebagai tawuran jarak menengah dan jauh. Artinya, mereka tawuran menggunakan plantingan, senjata tajam, batu, dan sebagainya serta tidak jarang membakar rumah-rumah warga. Dalam aksi tawuran mereka juga sering kali memanggil teman-teman kelompok serta warga dari desa lain. Pengerahan masa dilakukan biasanya karena konflik yang dianggap belum selesai, sehingga menimbulkan rasa saling dendam.

Tawuran biasanya terjadi pada siang atau sore hari dan kadang-kadang berlanjut sampai pagi hari. Pada awalnya, sekelompok pemuda desa berkumpul di tempat yang telah direncanakan. Mereka maju terlebih dahulu baru kemudian disusul kelompok pemuda yang lain jika konflik membesar (Sudarwadi, Wawancara, 25 Juli 2021). Tawuran antara warga Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran seringnya terjadi di jalan raya perbatasan antardesa, baik di Cikeusal Kidul maupun Cikeusal Lor, dan jalan masuk di Desa Cikeusal Kidul karena desa-desa tersebut hanya dipisahkan oleh jalan raya. Tidak hanya di jalan saja, tawuran juga terjadi di lapangan perbatasan Desa Cikeusal dan Pamedaran (Wariji, Wawancara, 29 Oktober 2021).

Konflik tawuran itu dapat terjadi berulang. Apabila terjadi kerugian (terutama luka-luka) yang dirasakan oleh satu pihak, pihak tersebut tidak terima atas penderitaan yang dialami, maka hal itu dapat menyebabkan konflik perkelahian atau tawuran kembali terjadi. Dengan kata lain, konflik hanya berhenti sementara. Konflik atau tawuran selalu berpotensi terjadi secara berulang. Tidak jarang pihak yang merasa tidak terima atas kerugian yang dialami mengajak anggota keluarga dari luar desanya untuk balas dendam, sehingga konflik tawuran hanya berhenti untuk sementara yang kemudian konflik dapat terulang kembali dalam kurun waktu yang tidak lama (Neli Rido, Wawancara, 27 Juli 2021).

Tawuran di Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran biasanya terjadi dalam masa dua bulan. Jika suasana dan keadaan masih belum terkontrol atau bahkan semakin memanas, Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Daerah (Kesbangpolda) Kabupaten Brebes dan Kepolisian Sektor (Polsek) Ketanggungan, Kepolisian Resort (Polres) Brebes, Komando Rayon Militer (Koramil) 15/Ketanggungan dan Kodim Brebes, Brimob, pemerintah desa, dan unsur-unsur yang terkait melakukan penjagaan agar tidak terjadi konflik dan tawuran berulang. Akan tetapi, setelah dua bulan dari konflik keadaan mulai stabil dan terkontrol sehingga kehidupan bermasyarakat normal kembali (Andri Agus Kristianto, Wawancara, 7 Oktober 2021).

### **Pengaruh Tawuran**

Pada saat terjadi konflik tawuran, polisi dan TNI-AD selalu berjaga. Akibat dari tawuran adalah komunikasi antara desa-desa yang terlibat menjadi buruk. Selain itu, akses jalan juga harus terhambat bahkan tertutup selama beberapa hari atau bahkan minggu. Situasi itu benar-benar membuat masyarakat Ketanggungan menjadi sulit karena di waktu-waktu tertentu menjadi tidak dapat menjual hasil panennya. Beberapa hari setelah tawuran, suasana di desa-desa konflik benar-benar tidak stabil, jauh dari kondusif, dan panas. Semua itu pada akhirnya juga dapat menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian perdagangan masyarakat yang menggantungkan diri di wilayah Kecamatan Ketanggungan (Sudarwadi, Wawancara, 25 Juli 2021).

Tawuran antarwarga juga telah menyebabkan kerugian materi atas rusaknya rumah-rumah warga dan juga kerugian nonmateri akibat puluhan warga yang mengalami luka-luka. Rumah-rumah warga biasanya rusak karena dibakar atau dilempari batu. Tingkat kerusakannyapun bermacam-macam mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Pada 2008 misalnya, puluhan rumah warga mengalami kerusakan, sedikitnya tiga hingga lima rumah dibakar massa, puluhan warga mengalami luka-luka. Kerugian ditaksir mencapai Rp200.000.000. Sementara itu, tawuran yang terjadi pada Desember 2014 menyebabkan puluhan warga dari kedua desa mengalami luka-luka, lima rumah dibakar massa, 19 rumah mengalami rusak ringan dan berat. Kerugian ditaksir mencapai Rp250.000.000. Menurut Sudarwadi, selama periode 2008-2015 tawuran yang terjadi di ketiga desa tidak menimbulkan korban jiwa atau sampai meninggal dunia (Sudarwadi, Wawancara, 25 Juli 2021). Tawuran yang melibatkan tiga desa itu juga mau tidak mau telah memengaruhi kondisi psikis masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, dan para lansia. Mereka

sebagian besar mengalami trauma, ketakutan, dan tidak aman di tempat yang seharusnya menjadi "rumah".

### **Upaya Penanggulangan Konflik**

#### ***Penanggulangan oleh Pemerintah Desa***

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meleraikan konflik yang terjadi adalah melalui komunikasi antarpemerintah desa setempat yang warganya terlibat dalam konflik. Tujuannya adalah agar masyarakat segera berdamai dan konflik yang menyebabkan tawuran tidak terulang kembali (Irwan Sudandi, Wawancara, 26 Juli 2021). Namun demikian, konflik yang menyebabkan tiga desa itu tetap sering terjadi. Salah satu kunci agar konflik tidak terulang kembali adalah dari pemerintah desa. Pemerintah desa diharapkan lebih respek dan tidak menyepelkan permasalahan yang terjadi di desa-desa tersebut terutama permasalahan antarpemuda desa. Pemerintah desa sebagai otoritas yang paling memahami dan mengerti karakteristik masyarakatnya juga seharusnya lebih cepat, tanggap, dan serius dalam menghadapi berbagai permasalahan (Nurul Khomar, Wawancara, 22 November 2020).

Pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik yang sering kali terjadi di Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran dalam perantaranya dibantu juga oleh tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat dari masing-masing pihak yang berkonflik (biasanya diwakilkan oleh salah satu anggota keluarganya karena pemuda yang berkonflik tidak datang dalam perkumpulan). Mereka biasanya berkumpul di titik tertentu seperti di balai desa-balai desa setempat untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Akan tetapi, walaupun sudah terjadi kesepakatan, konflik masih berpotensi terus berulang hingga berujung pada tawuran antarwarga (Sudarwadi, Wawancara, 25 Juli 2021). Pada tataran penyelesaian, pemerintah desa berperan sebagai mediator. Mediasi diperlukan agar konflik tidak berkepanjangan serta menemui titik penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Permasalahan yang dapat menimbulkan konflik lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak desa, kecuali jika terjadi tindak pidana barulah diselesaikan secara hukum (Wariji, Wawancara, 29 Oktober 2021).

Setelah diadakan perjanjian antardesa, demi menjaga keamanan dan tindakan preventif terjadinya konflik, pemerintah desa terutama kepala-kepala desa rajin melakukan silaturahmi antardesa khususnya setiap lebaran. Hal itu dilakukan agar komunikasi antardesa berjalan dengan lancar. Pemerintah desa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berkolaborasi melalui program-program yang bertujuan mencegah konflik. Program-program yang dimaksud antara lain program seribu tokoh, membagi hewan kurban, dan bagi-bagi sembako kepada masyarakat setempat (Neli Rido, Wawancara, 27 Juli 2021).

#### ***Penanggulangan Polsek Ketanggungan dan Koramil 15/ Ketanggungan***

Dalam mengatasi dan mencegah konflik, Polsek Ketanggungan melakukan pendekatan secara sosial yang didukung oleh Bhabinkamtibmas. Mereka selalu melakukan pengawasan daerah ketika ada kegiatan-kegiatan khusus bekerjasama dengan berbagai instansi, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda. Selain itu, pihak kepolisian juga mengadakan sosialisasi, serta penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang konflik masyarakat secara berkala (Heri Riyanto, Wawancara, 10 Oktober 2021). Melalui kegiatan itu, diharapkan masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari kekerasan apalagi pengeroyokan. Jika sampai terjadi, pihak Polsek Ketanggungan tidak ragu melakukan penangkapan dan memprosesnya hingga ke tingkat pengadilan (Suroto, Wawancara, 7 Juli 2021).

Sementara itu, upaya Koramil 15/Ketanggungan dalam mencegah berulangnya konflik kurang lebih tidak jauh berbeda dari upaya yang dilakukan oleh Polsek Ketanggungan. Upaya represif dan preventif dilakukan untuk senantiasa menjaga

stabilitasa. Dalam menyelesaikan konflik, Koramil 15/Ketanggungan juga memiliki peranan sebagai mediator kedua belah pihak. Selain itu, Koramil 15/Ketanggungan juga melakukan suatu pendekatan-pendekatan secara persuasif yaitu dengan cara memberikan pemahaman santiaji, pembekalan dan pengarahan, serta penyuluhan hukum. Penyuluhan dilakukan dengan menggandeng Muspika dan pemerintah desa, serta dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI-AD, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemuda desa. Kegiatan-kegiatan kolaboratif itu diharapkan dapat meningkatkan rasa saling menghargai antarsesame, sehingga meminimalisasi dan bahkan menghilangkan konflik sama sekali (Heri Riyanto, Wawancara, 10 Oktober 2021).

### ***Penanggulangan oleh Kesbangpolda Kabupaten Brebes***

Setiap kali terjadi tawuran, Kesbangpolda Kabupaten Brebes selalu melaksanakan pemantauan dan pendataan dengan datang langsung ke lokasi kejadian. Pendataan dilakukan antara lain meliputi penelusuran latar belakang dan kronologi konflik, pihak-pihak yang dirugikan baik secara materi maupun nonmateri-meliputi pendataan rumah-rumah rusak, kendaraan terbakar, serta jumlah korban jiwa dan luka-luka. Badan Kesbangpolda Kabupaten Brebes memiliki peranan sebagai koordinator di bawah Pemerintah Daerah (Bupati). Selain itu, Badan Kesbangpolda Kabupaten Brebes juga melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat dan pemuda desa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Konflik dapat mereda kurang lebih dua bulan setelah kejadian, meskipun kadang-kadang suasana masih panas dingin dan sering kali memanas menjelang Idul Fitri (Andri Agus Kristianto, Wawancara, 7 Oktober 2021).

Badan Kesbangpolda Kabupaten Brebes terus melaksanakan pemantauan atau monitoring di daerah-daerah rawan konflik secara berkala bekerja sama dengan kepala desa setempat. Informasi pertama selalu datang dari pemerintah desa melalui kepala desa. Selain pemantauan, Badan Kesbangpolda Kabupaten Brebes juga melakukan sosialisasi ke daerah-daerah rawan konflik di Kabupaten Brebes, terutama di Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran (Andri Agus Kristianto, Wawancara, 7 Oktober 2021).

Adapun kendala dalam penyelesaian konflik menurut Badan Kesbangpolda Kabupaten Brebes adalah akses lokasi dan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam penanggulangan dan pencegahan terjadinya konflik (Parmin, Wawancara, 13 Oktober 2021). Pada 2010, jalan yang menghubungkan Ketanggungan dengan daerah selatan terutama ketiga desa yang berkonflik itu rusak parah, ditambah medan jalan menuju desa-desa tersebut melewati hutan dan pegunungan. Hal itu dianggap sebagai penghambat berbagai kegiatan. Kondisi jalan yang rusak itu pula yang sering kali menghambat penanganan tawuran. Para staff Kesbangpolda Kabupaten Brebes sering kali terlambat sampai di tempat kejadian. Oleh karena terhambat di perjalanan, mereka sampai di kejadian ketika situasi sudah semakin memanas dan tawuran tidak terkendali (Andri Agus Kristianto, Wawancara, 7 Oktober 2021).

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur lain seperti jaringan telepon seluler dan internet juga sebenarnya menjadi salah satu pendukung terpenting yang dapat menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Baik jaringan telepon seluler maupun internet sangat penting untuk dapat melaporkan situasi di lapangan secara *realtime*. Namun, jaringan telepon dan internet di tiga desa itu pada saat konflik masih sangat terbatas dan kurang memadai, sehingga informasi yang diterima oleh pemerintah kabupaten sangat terlambat (Andri Agus Kristianto, Wawancara, 7 Oktober 2021).

## Simpulan

Konflik yang terjadi di Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran merupakan konflik horizontal. Konflik tersebut umumnya disebabkan oleh pemuda desa karena berbagai permasalahan yang dianggap sepele. Tawuran antarwarga yang melibatkan masyarakat Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran adalah muara dari konflik yang kemudian diekspresikan melalui tindakan negatif dan represif, yaitu kekerasan dan pengeroyokan. Dalam hal ini, konflik yang berlarut-larut juga sangat dipengaruhi oleh peranan informal leader. Tawuran sendiri pada akhirnya menyebabkan berbagai kerugian baik material maupun nonmaterial. Kerugian itu juga sering kali menimpa warga yang sebenarnya tidak terlibat dan tidak bersalah, mulai dari rumah-rumah yang rusak, kendaraan, hingga psikis yang terganggu. Konflik yang terjadi di ketiga desa ini bagaikan api dalam sekam. Maksudnya adalah meskipun sudah terjadi perdamaian dari kedua belah pihak yang dimediasi oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah, namun konflik akan selalu muncul bahkan hampir setiap tahun.

## Referensi

- Liputan6.com (2008). Dua desa Tawuran, puluhan rumah rusak. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/166011/dua-desa-tawuran-puluhan-ruamah-rusak-pada-22-Desember-2020>,
- Fadhilah, I. (2017). Posisi perempuan dalam tradisi buka meja (Studi di Desa Cikeusal Lor, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes). *Sabda: Jurnal Kebudayaan*, 10(1), 1-25. <https://doi.org/10.14710/sabda.10.1.1-25>.
- Jayeng, R. (23 Desember 2014). Buntut tawuran, Cikeusal Lor dan Kidul Mencekam. Diakses dari <http://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/10999/23/12/2014/buntut-tawuran-cikeusal-lor-dan-kidul-mencekam-pada-22-Desember-2020>,
- Kompas.com. lebaran usai, tawuran lanjut. (5 Oktober 2008). Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2008/10/05/1206235/~Regional~Jawa-pada-20-November-2021>
- Pranggono, S. E. (2014). *Pemberdayaan peran tokoh pemimpin informal guna mencegah konflik sosial dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Sulaeman, M. M., S. Homzah, M. A. Mauludin, (2009). Peran perempuan dalam penyelesaian konflik antar warga masyarakat desa (Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). Diakses dari <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Peran-Perempuan-Dalam-Penyelesaian-Konflik.pdf> pada 22 Desember 2020.
- Tim Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Brebes. (2012). *Laporan akhir dtudi pemetaan wilayah rawan konflik Brebes*. Brebes: Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- Wasino dan E. S. Hartatik. (2018). *Metode penelitian sejarah: Dari riset hingga penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

## Informan

Irwan Susandi, Kepala Desa Cikeusal Lor.

Neli Rido, Kepala Desa Cikeusal Kidul.

Parmin, Tokoh Masyarakat.

Sudarwadi, Kepala Desa Cikeusal Kidul Periode 2008-2013.

Wariji, Kepala Desa Pamedaran Periode 2007-2013 dan 2019-Sekarang.

Andri Agus Kristianto, Staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes.